ISSN : 2443-3624

Vol. II, No. 2, November 2016

JURNAL

Pendidikan Sejarah

Program Studi Pendidikan Sejarah
FKIP UNIDAYAN

ISSN : 2443-3624

JURNAL

Pendidikan Sejarah

Vol. II, No. 2, November 2016

Weti; Pranata Sistem Pemungutan Pajak di Kesultanan Buton
L.M. Nasrun Saafi

*Dampak Pertambangan Nikel terhadap Kehidupan Masyarakat
Desa Pongkalaero Kecamatan Kabaena Selatan*
Haeruddin & Almasullah

*Hubungan antara Keterampilan Dasar Bertanya Guru dengan Prestasi Belajar Siswa
pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas X SMA Negeri 2 Batauga*
Maskun Baitu & Suwardin Amir

Belo Bamba dan Belo Baruga: Peranannya dalam Wilayah Kesultanan Buton
Munawir Mansyur

Penumpasan Pemberontakan DI/TII di Kulisusu
Rustam Awat & Dwi Pirmansyah

*Peningkatan Hasil Belajar IPS Sejarah melalui Penerapan Metode *Problem Solving*
di SMP Negeri 2 Baubau*
Amaluddin

PENGELOLA REDAKSI

Pembina/Penasihat

Drs. Anwar, M.Pd

Pengarah

La Ode Supardi, S.Pd., M.Pd

Pimpinan Redaksi

Rustam Awat, S.S., M.Hum

Sekretaris Redaksi

Haeruddin, S.Pd., M.A.

Penyunting

Prof. Dr. Anwar Hafid, M.Pd

Hasaruddin, S.Pd., M.Hum

Drs. Tamanajo, M.Pd.

Sirkulasi

Amaluddin, S.Pd., M.Pd

Munawir Mansyur, S.Pd.

Diterbitkan Oleh

Program Studi Pendidikan Sejarah

FKIP Unidayan Baubau

Alamat Redaksi

Jl. Dayanu Ikhsanuddin No. 124 Baubau

Telp./Faks. (0402) 28211138

E-mail: jurnal_pesefkipund@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Pengelola Redaksi	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iv
 <i>Weti; Pranata Sistem Pemungutan Pajak di Kesultanan Buton</i> <i>Oleh: L.M. Nasrun Saafi</i>	69
 <i>Dampak Pertambangan Nikel terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Pongkalaero Kecamatan Kabaena Selatan</i> <i>Oleh: Haeruddin & Almasullah</i>	80
 <i>Hubungan antara Keterampilan Dasar Bertanya Guru dengan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas X SMA Negeri 2 Batauga</i> <i>Oleh: Maskun Baitu & Suwardin Amir</i>	89
 <i>Belo Bamba dan Belo Baruga: Peranannya Dalam Wilayah Kesultanan Buton</i> <i>Oleh: Munawir Mansyur</i>	97
 <i>Penumpasan Pemberontakan DI/TII di Kulisusu</i> <i>Oleh: Rustam Awat & Dwi Pirmansyah</i>	106
 <i>Peningkatan Hasil Belajar IPS Sejarah melalui Penerapan Metode Problem Solving di SMP Negeri 2 Baubau</i> <i>Oleh: Amaluddin</i>	116

PENUMPASAN PEMBERONTAKAN DI/TII DI KULISUSU

¹Rustam Awat & ²Dwi Pirmansyah

¹Dosen & ²Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unidayan

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang masuknya DI/TII di Kulisusu yang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Kulisusu dan upaya pemerintah untuk melakukan penumpasan terhadap gerakan DI/TII tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kawasan Kulisusu ini masuk dalam jaringan wilayah pergerakan DI/TII dan dijadikan pusat kekuatan DI/TII Abdul Qahar Mudzakar karena letaknya yang strategis, jauh dari jangkauan pihak pemerintah dan memiliki pelabuhan yang cukup aman di daerah Labuan Tobelo dan hasil hutan yang cukup banyak untuk menunjang kebutuhan para anggota prajurit-prajurit DI/TII. Dampak yang ditimbulkan DI/TII adalah mengungsinya penduduk secara besar-besaran dari tempat yang tidak aman menuju tempat yang lebih aman, Proses penumpasan DI/TII di Kulisusu pemerintah mendirikan pos-pos dan membentuk kesatuan LKPS (Lembaga Kesatuan Pertahanan Sipil).

PENDAHULUAN

Dalam dekade 1953-1965 banyak sekali terjadi gangguan keamanan dalam negeri yang bersumber dari munculnya gerakan kelompok bersenjata yang bercita-cita mendirikan Negara Islam. Salah satu peristiwa itu terjadi di Sulawesi Selatan, peristiwa yang menciptakan keadaan yang tidak menentu sejak tahun 1956 sampai pada awal tahun 1965 yang kemudian di kenal dengan Pemberontakan DI/TII yang dipelopori oleh Abdul Qahar Mudzakar sebagai pemimpinnya. Proklamasi DI/TII Abdul Qahar Mudzakar sebagai bagian dari “Negara Islam Indonesia” Kartosoewirjo merupakan pemberontakan terhadap kekuasaan negara yang sah, selain pembangkangan pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Gangguan keamanan yang diakibatkan oleh DI/TII yang terjadi di Sulawesi Selatan banyak menimbulkan keresahan dan ketakutan yang amat bagi masyarakat dikarenakan keamanan mereka terancam. Pada tahun 1956 pengaruh DI/TII ini hampir meliputi seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Abdul Qahar Mudzakar memusatkan kekuatannya di daerah luwu. Sementara itu, awal gerakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Tentara), di Buton berpusat di kawasan Wanci (Wakotobi), kemudian pergerakan tersebut membesar hingga masuk ke Lasalimu dan meluas hingga ke Kulisusu. Di kalangan masyarakat lokal, anggota DI/TII ini dikenal dengan sebutan gerombolan.

Kawasan Kulisusu (Buton Utara) bergejolak akibat gerakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang dipimpin Haerun Sahadat. Daerah Kulisusu masuk dalam jaringan wilayah pergerakan DI/TII dan dijadikan pusat kekuatan DI/TII Abdul Qahar Mudzakar karena letaknya yang strategis, jauh dari jangkauan pihak pemerintah dan memiliki pelabuhan yang cukup aman di daerah Labuan Tobelo dan memiliki hasil hutan yang cukup banyak untuk menunjang kebutuhan para anggota prajurit-prajurit DI/TII.

DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) selalu melakukan penyisiran di sekitar kampung-kampung di kawasan Kulisusu. Pergerakan mereka selalu mendapat perlawanan dari TNI dan masyarakat yang tidak sepaham dengan cita-cita perjuangan DI/TII, akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang ikut dalam gerakan tersebut, bahkan di beberapa kampung ada pemimpin gerakan.

Aktifitas gangguan DI/TII di Kulisusu mulai surut sejak tanggal 21 Juli 1962, ketika itu Andi Bahtiar selaku komandan Bataliyon 21 dan Haerun Sahadat selaku komandan Bataliyon 24 serta sebagian anak buahnya menyerah dan menyatakan diri di Raha-Muna untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, dan memerintahkan kepada semua anak buahnya dimana saja berada untuk segera mengikuti jejaknya, mentaati dan melaksanakan himbauan pemerintah untuk kembali ke masyarakat dengan cara melapor ke pos-pos terdekat. Proses dekonsentrasi memuncak ketika awal Oktober 1965, Letkol TII Muhammad Jufri Tambora Komandan Resimen II Hasanuddin beserta sebagian anak buahnya dinyatakan kembali ke masyarakat diterima oleh pemerintahan dan TNI di Kendari dalam suatu acara ramah tamah di gedung DPRD tingkat II Kendari. Ini menandakan berakhirnya pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan termaksud di Buton Utara (Hadara, 1998: 34). Setelah berakhirnya gangguan DI/TII, kawasan Kulisusu berusaha diintegrasikan ke dalam wilayah Kabupaten Muna yang terbentuk berdasarkan UU No. 29 tahun 1945.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penelitian tentang penumpasan pemberontakan DI/TII di Kulisusu tahun 1957-1961 menjadi topik yang menarik dikaji. Dari penjelasan di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi masuknya DI/TII di Kulisusu?
2. Dampak apa yang ditimbulkan gerakan DI/TII di Kulisusu?
3. Bagaimana proses penumpasan gerakan DI/TII di Kulisusu?

Dalam menganalisis kajian ini maka penulis menggunakan teori pemberontakan seperti yang dikemukakan oleh Dengel (1995), Jackson (1990), Syamsuddin (1990) dan Nasikun (1988).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu memberikan penjelasan atau penggambaran tentang proses penumpasan gerakan DI/TII di Kulisusu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sejarah. Metode ini dipilih karena dipandang relevan dengan penelitian penumpasan pemberontakan DI/TII di Kulisusu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder.

Data primer yaitu data-data yang diperoleh dari sejumlah informan baik orang-orang yang terlibat langsung dalam peristiwa pemberontakan DI/TII di Kulisusu, maupun tokoh adat (Parabela), tokoh agama (imam desa), dan tokoh-tokoh pemerintahan yang mengetahui tentang DI/TII di Kulisusu. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan menelaah laporan-laporan penelitian, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data tersebut dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dua teknik (metode) yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mengumpulkan data langsung pada objek penelitian, dalam hal ini melakukan

wawancara/*interview* kepada tokoh adat, pemerintah setempat dan orang-orang yang mengetahui tentang penumpasan pemberontakan DI/TII di Kulisusu. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan literatur ilmiah dan catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah penumpasan pemberontakan baik itu dari instansi pemerintahan maupun tokoh adat Kecamatan Kulisusu.

Data yang telah dikumpulkan baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan selanjutnya diseleksi (kritik data). Kritik data dilakukan melalui dua cara yaitu kritik eksternal, digunakan untuk mengevaluasi sumber sejarah dari segi autentiknnya atau keaslian data. Kritik Internal, digunakan untuk mengevaluasi sumber sejarah dari segi kebenaran dan keabsahan data. Hal ini dilakukan dengan jalan membandingkan bukti-bukti lain yang menerangkan kejadian atas fenomena yang mempunyai sifat yang sama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam dekade 1953-1965 banyak sekali terjadi gangguan keamanan dalam negeri yang bersumber dari munculnya gerakan kelompok bersenjata yang bercita-cita mendirikan Negara Islam. Salah satu peristiwa itu terjadi di Sulawesi Selatan, peristiwa yang menciptakan keadaan yang tidak menentu sejak tahun 1953 sampai pada awal tahun 1965 yang kemudian dikenal Pemberontakan DI/TII yang dipelopori oleh AbdulQahar Mudzakar sebagai pemimpinnya. Proklamasi DI/TII Abdul Qahar Mudzakar sebagai bagian dari “Negara Islam Indonesia” Kartosoewirjo merupakan pernyataan pemberontakan terhadap kekuasaan negara yang sah, selain pembangkangan pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada tahun 1956 pengaruh ini hampir meliputi seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, Abdul Qahar Mudzakar memusatkan kekuatannya di daerah Luwu. Awal gerakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Tentara), di Buton yang berpusat di kawasan Wanci (Wakotobi), kemudian pergerakan tersebut membesar hingga masuk ke Lasalimu. Daerah Lasalimu dijadikan markas untuk anggota DI/TII dan meluas hingga wilayah Kulisusu yang pernah dijadikan markas kosentrasi dari Bataliyon 24. Pemilihan Kulisusu disebabkan karena daerah ini memiliki wilayah yang strategis untuk daerah oprasional gerakan DI/TII.

Rute perjalanan DI/TII sebelum masuk dan menyebarkan pengaruhnya di wilayah Kulisusu, diawali dengan masuknya DI/TII di wilayah Wanci. Wanci dijadikan sebagai pusat pergerakan DI/TII di pulau Buton, kemudian daerah Lasalimu dijadikan markas pasukan DI/TII, selanjutnya DI/TII menyusuri daerah Lasalimu Selatan yang jadikan tempat persinggahan dan mencari dukungan dari masyarakat setempat. DI/TII kemudian memasuki wilayah Siotapina dan dijadikan pula sebagai tempat persinggahan dan mencari dukungan dari masyarakat setempat hingga akhirnya memasuki wilayah Pasarwajo. Di daerah Pasarwajo pasukan DI/TII yang dipimpin oleh Haerun Sahadat mendapat perlawanan dari pasukan pengamanan yang berada di daerah tersebut, oleh karena kurangnya persenjataan akhirnya pasukan DI/TII mundur dan kembali pada markas utama yang berada di daerah Lasalimu. Dari situlah pasukan DI/TII mulai berfikir untuk memperluas wilayah kekuasaanya ke Kulisusu agar mendapat dukungan yang lebih banyak lagi. Perjalan pasukan DI/TII ke Kulisusu melewati daerah Wasuamba dan Lawele, di daerah ini pasukan DI/TII dihadap kembali oleh pasukan pengamanan dari anggota TNI, hal ini kemudian memaksa pasukan DI/TII mundur kembali ke markas utama. Pada malam harinya, pimpinan DI/TII yang beranggotakan sekitar

70 orang menyeberang menggunakan perahu melalui perairan Wa Ode Buri untuk menuju ke Kulisusu.

Sekitar tahun 1957 DI/TII telah mendarat di Kulisusu, kurang lebih 70 gerilyawan di bawah pimpinan Haerun Sahadat yang dikawal Andi Bahtiar masuk melalui perairan Wa Ode Buri pada malam hari dan kemudian langsung menuju Ealahaji, untuk menemui kepala kampung yang ada di tempat tersebut. Dalam hal membicarakan hubungan kerja sama tentang misi yang di perjuangkan DI/TII, yaitu menjadikan Kulisusu sebagai daerah operasi basis kekuatan DI/TII sebagai Negara Islam. Dalam pertemuan yang singkat ini kepala kampung menerima tawaran yang disampaikan oleh Haerun Sahadat karena tawarannya mengatasnamakan agama.

Kawasan Kulisusu (Buton Utara) bergejolak akibat gerakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang dipimpin Haerun Sahadat. Dikarenakan Kawasan Kulisusu ini masuk dalam jaringan wilayah pergerakan DI/TII dan dijadikan pusat kekuatan DI/TII Abdul Qahar Mudzakar karena letaknya yang strategis, memiliki hutan yang luas yang biasa dijadikan tempat untuk bersembunyi, jauh dari jangkauan pihak pemerintah dan memiliki pelabuhan yang cukup aman di daerah Labuan Tobelo dan memiliki hasil hutan yang cukup banyak untuk menunjang kebutuhan para anggota prajurit-prajurit DI/TII. Barulah pada tanggal 3 februari 1965 gerakan DI/TII di kawasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dianggap berakhir setelah pasukan Siliwangi berhasil menembak mati pimpinan besar DI/TII Abdul Qahar Mudzakar.

A. Latar Belakang Masuknya Gerakan DI/TII di Kulisusu

Gejala kekacauan di Sulawesi Tenggara bermula di Kolaka daerah yang secara geografis berbatasan langsung dengan kabupaten Luwu, pusat gerilyawan di Sulawesi Selatan. Fenomena tersebut mulai tampak sejak Februari 1953. Pada bulan itu terjadi perampokan bersenjata api Tangkede, yang disusul dengan pembunuhan dari beberapa tokoh masyarakat yang berpengaruh di daerah tersebut. Kekacauan ini adalah fase pertama dari pertingkaian antara TNI dan KGSS yang berpusat di Sulawesi Selatan. Kekacauan terus berkembang setelah kegagalan rencana penggabungan para bekas gerilyawan menjadi anggota TNI, melalui jalur Corps Tjadian Nasional (CTN) (Hadara, 1998: 46).

Dalam komperensi pertama DI/TII di Makalua pada tanggal 7 Agustus 1953, Abdul Qahar Mudzakar selaku komandan pasukan Hasanuddin memproklamasikan bahwa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara sekitarnya dinyatakan sebagai Negara Islam Indonesia (NII) dan anggota TKR yang dilebur menjadi TII (Tentara Islam Indonesia). Sejak itu operasi gerilyawan mulai mengalami perubahan-perubahan terutama dalam keorganisasian. Dengan demikian aktivitas DI/TII di Sulawesi Tenggara mulai memasuki babak baru.

Gerakan DI/TII pertama kali masuk di daerah Buton yaitu Wanci (Wakatobi) kemudian pergerakan tersebut membesar hingga masuk ke Lasalimu dan meluas hingga ke Kulisusu. Perluasan daerah kekuasaan gerakan DI/TII ke Kulisusu yang melewati daerah Wasuamba mendapat perlawanan dari pihak TNI yang bermarkas di Lawele. DI/TII pun terpaksa mundur di karenakan kurangnya pasukan dan persenjataan yang dimiliki pada saat itu dan kemudian DI/TII pun menyebrang ke Kulisusu dengan menggunakan sampan pada malam hari.

Hal yang menarik yang membuat pasukan DI/TII datang ke Kulisusu karena faktor wilayah yang strategis, jauh dari jangkauan pengamanan, dan memiliki hasil hutan yang

banyak yang dapat menunjang untuk kebutuhan pasukan DI/TII. Sekitar tahun 1957 DI/TII sudah mendarat di Kulisusu, kurang lebih 70 gerilyawan di bawah pimpinan Haerun Sahadat yang dikawal Andi Bahtiar masuk melalui perairan Wa Ode Buri pada malam hari dan kemudian langsung menuju Ealahaji, untuk menemui kepala kampung yang ada di tempat tersebut. Dalam hal membicarakan hubungan kerja sama tentang misi yang diperjuangkan DI/TII, yaitu menjadikan Kulisusu sebagai daerah operasi basis kekuatan DI/TII sebagai Negara Islam. Dalam pertemuan yang singkat ini kepala kampung menerima tawaran yang disampaikan oleh Haerun Sahadat karena tawarannya mengatasnamakan agama.

Selanjutnya setelah mengadakan pertemuan yang dilakukan di Ereke, Haerun Sahadat melakukan pendekatan bersama pasukannya untuk mempengaruhi tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh guna memberi dukungan yang kuat kepada DI/TII.

Dalam rangka memperlancar koordinasi antara daerah-daerah yang dinyatakan dalam kekuasaan DI/TII, maka setiap kampung ditempatkan KDT (Komando Distrik), yang menjadi KDT diutamakan dari masyarakat setempat yang dianggap mampu menjalankan tugas yang telah ditentukan oleh DI/TII. Para KDT bertugas melakukan koordinasi dengan masyarakat dan memberi pelayanan kepada gerilyawan DI/TII yang mengadakan operasi pada suatu daerah tertentu.

Untuk mendukung pergerakan DI/TII di Kulisusu mereka tidak hanya membutuhkan dukungan masyarakat, tetapi mereka juga membutuhkan dukungan persenjataan guna menjaga keamanan dan untuk membela diri bilamana terjadi pertempuran antara pasukan DI/TII dengan pasukan TNI dan POLRI yang berada di tempat tersebut. Persenjataan awalnya didatangkan dari daerah Luwu yang mana di sana merupakan markas utama pasukan DI/TII yang dipimpin langsung oleh Abdul Qahar Mudzakar, kemudian persenjataan melewati wilayah Kolaka dan selanjutnya ke Wa Ode Buri yang di kawal oleh Andi Bahtiar yang melewati perairan Wawonii selanjutnya dibawa menuju wilayah Kulisusu.

Sekitar bulan Juni sampai Agustus 1957 seluruh wilayah daerah Kulisusu dikuasai oleh pasukan DI/TII. Setelah para DI/TII yang dipimpin oleh Haerun Sahadat yang menjabat sebagai Komandan Bataliyon 24 menguasai wilayah Kulisusu secara keseluruhan, maka diberlakukan Hukum Islam dengan struktur pemerintahan Islam menurut Dharma Bakti. Dengan tersusunnya pemerintahan Darul Islam yang telah digariskan oleh pimpinan besar DI/TII Abdul Qahar Mudzakar dalam satu instruksi yang memerintahkan dan menetapkan garis pemisah yang riil antara daerah *de facto* Darul Islam dengan kota yang diduduki TNI (Diwan, 2000 : 25).

B. Dampak Yang Ditimbulkan DI/TII di Kulisusu

Pada awalnya gerakan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat, serta dukungan PNS dan kepala kampung. Awal kedatangan DI/TII dengan dasar fanatik keagamaan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Namun setelah mendapat dukungan yang teramat besar dari masyarakat Kulisusu pasukan DI/TII mulai melakukan hal yang menyimpang dari tujuan utamanya, pasukan ini mulai melakukan pemungutan atau meminta sumbangan kepada masyarakat dengan cara memaksa.

Dampak terbesar dan awal dirasakan oleh masyarakat Kulisusu akibat pemberontakan DI/TII adalah mengungsinya penduduk secara besar-besaran dari tempat-tempat yang tidak

aman yang menjadi basis gerilyawan ke daerah yang lebih aman, umpamanya ke kota atau ke daerah yang dikuasai oleh TNI dan aman menurut mereka.

Di wilayah Kulisusu penduduk sudah mulai mengungsi dan melarikan diri diantaranya ada pegawai negeri dan kepala kampung. Sejak Agustus 1958 kurang lebih 300 penduduk dari dua kampung dan desa yaitu di Bone Lipu dan Wa Ode Buri mengungsi ke kota Baubau. Masih pada tahun yang sama sebagian masyarakat yang berada di Lambale, Lakumbe, dan di sekitar Ereke mulai mengungsi ke Lasalimu terus menuju ke Baubau dan Raha bahkan ada yang berlayar menuju ke Sulawesi Tengah.

Pengungsian dikarenakan pihak gerilyawan sudah mulai membakar desa dan kampung, mulai merampas, merampok, menculik, dan bahkan membunuh serta mulai mengevakuasi dan menggiring penduduk secara paksa ke hutan atau ke daerah kekuasaan DI/TII yang mereka namakan tarugval basis dan aunval basis. Tarugval basis adalah tempat berkumpul jika terdesak musuh, dan aunval basis adalah tempat berkumpul untuk menyerang musuh. Sejak itu struktur sosial permukiman sudah mulai mengarah pada pembentukan masyarakat kota dan masyarakat hutan. Masyarakat kota diidentifikasi sebagai masyarakat yang tidak mau ikut gerilyawan atau anti gerilyawan. Sedangkan masyarakat hutan adalah masyarakat yang diidentifikasi sebagai pengikut gerilyawan yang sukarela atau terpaksa ikut karena keadaan. Dalam pandangan kaum gerilyawan, kelompok terakhir dinamakan pula sebagai warga markas. Selama pergolakan terjadi seolah-olah masyarakat terintegrasi dalam pola pengikut dan bukan pengikut gerilyawan. Struktur yang terbentuk berdasarkan ikatan kekeluargaan menjadi porak poranda. Tidak sedikit orang yang terpisah dengan keluarga, orang tua, anak, saudara, paman, kemonakan dan lain-lain (Hadara, 1998 : 89).

Arus pengungsian memuncak secara besar-besaran setelah pertempuran di Ealahaji Ereke pada pertengahan Oktober 1960. Pertempuran terbesar selama pergolakan itu meningkat pula arus pengungsian secara besar-besaran sepanjang sejarah gerilyawan DI/TII di Kulisusu. Sejak pertempuran itulah kurang lebih 500 orang penduduk pergi meninggalkan kampung untuk mencari tempat perlindungan yang aman menurut mereka dan tempat-tempat yang dikuasai oleh TNI.

Dampak lain yang timbul akibat gencarnya aktifitas gerilyawan DI/TII di Kulisusu setelah terjadinya pengungsian secara besar-besaran, adalah hancurnya struktur ekonomi. Perang total mobilitas umum, strategi bumi hangus dan blokade ekonomi mengakibatkan lumpuhnya aktivitas ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya bermuara pada kelaparan terjadi di mana-mana dan kemiskinan, dan penduduk yang mengungsi ke kota keadaan ekonominya agak membaik. Kerusakan struktur pertanian dan perkebunan akibat pembakaran dan pengrusakan struktur pelayaran dan perdagangan akibat penghadangan dan perampokan di laut oleh gerilyawan maupun salah satu sebab timbulnya kelaparan dan kemiskinan struktural itu. Selain itu lebih dari separuh para pengungsi adalah petani maka lahan-lahan pertanian dan perkebunan mereka tinggalkan atau dibiarkan terbengkalai sehingga dikuasai dan diolah pihak gerilyawan (Hadara, 1998 : 95).

Selama masa pergolakan terjadi terpaksa orang-orang menjauh dari sumber-sumber ekonomi karena sumber-sumber itu dikuasai oleh pihak pemberontak. Orang menjauh dari ladang dan perkebunannya, ternak, menjauh dari lokasi penangkapan ikan, meninggalkan rumah dan menghindari jalur pelayaran dan perdagangan yang dikuasai oleh gerilyawan (Hadara, 1998 : 100).

C. Proses Penumpasan Pemberontakan DI/TII di Kulisusu

Gerakan DI/TII di Sulawesi Tenggara memakan waktu yang cukup lama untuk menumpasnya dengan wilayah yang cukup luas dan meliputi wilayah konsentrasi termasuk wilayah Kulisusu yang pernah dijadikan markas konsentrasi Bataliyon 24 untuk wilayah Buton yang strategis untuk operasional gerakan DI/TII tersebut, karena secara geografis Kulisusu berbatasan langsung dengan kecamatan Bonegunu yang terletak di bagian barat, bagian utara berbatasan langsung dengan kecamatan Wakarumba, bagian selatan berbatasan langsung dengan kecamatan Lasalimu, bagian timur berbatasan dengan laut Banda.

Kulisusu adalah salah satu kekuatan basis DI/TII dari Bataliyon 24 untuk wilayah Buton. Sejak tahun 1957 hingga akhir tahun 1961 DI/TII masuk di Kulisusu dan menanamkan pengaruh-pengaruh terhadap masyarakat dan melakukan kegiatan yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Dalam upaya melaksanakan tindakan penumpasan DI/TII di Kulisusu yang selalu menyebabkan keresahan dan ketidaktenangan di hati masyarakat Kulisusu dan sekitarnya, maka pemerintah sebagai pemegang garis komando tertinggi di kawasan ini berhasil mengisolir para gerilyawan DI/TII dari simpati masyarakat. Berkat dukungan rakyat Kulisusu serta TNI dan Polri, sehingga sukses di dalam gerak dan tindakan terutama untuk mengisolir para gerilyawan DI/TII dan sisa-sisa pengikutnya.

Namun sebelumnya pemerintah berupaya memindahkan masyarakat yang berada di kawasan Kulisusu guna menjaga keselamatan bilamana sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemerintah Kulisusu segera menyediakan tempat-tempat penampungan bagi para pengungsi. Selain itu pihak pemerintah memohon kepada TNI-AD Teritorium Infanteri 23 KO Group Pertahanan IV dalam perintah operasi No.01 dhar/KGP.IV/PO/60 tanggal 23 Maret 1960, memerintahkan:

1. KPN Buton untuk menyediakan tempat-tempat di daerah-daerah sekitar Baubau guna memindahkan penduduk dari Kulisusu dan sekitarnya.
2. KPN Muna menyediakan tempat-tempat di daerah-daerah sekitar Muna guna memindahkan penduduk dari Kulisusu dan sekitarnya (Diwan, 2000 : 29).

Dalam operasi pelaksanaan penumpasan DI/TII di Kulisusu pemerintah mendirikan pos-pos kesatuan di beberapa tempat strategis yang dianggap kurang aman. Pos I di wilayah Ereke meliputi, Eelahaji, La E dan Kalibu, Lakumbe, Lambale, dan Wa Ode Buri. Sedangkan Pos II di wilayah Bone Lipu meliputi, Rombo, Witamemea, Lakonea, dan Lasora. Untuk mengkoordinasi tiap-tiap pos yang telah dibentuk oleh pemerintah Kulisusu diawasi langsung oleh para TNI dan polisi. Dibentuknya kesatuan LKPS (Lembaga Kesatuan Pertahanan Sipil) yang anggotanya terdiri dari rakyat terlatih yang dipersenjatai untuk membedakan masyarakat dan pasukan DI/TII pemerintah membuatkan tanda khusus yaitu sebuah pita merah yang terikat di lengan sebelah kanan.

Pada bulan Juni 1961 terjadi pertempuran di hutan Eelahaji antara gerilyawan DI/TII berhadapan dengan pasukan TNI sehingga menyebabkan gugurnya La Muka dan beberapa orang dari pasukan DI/TII. Pasukan DI/TII naik ke gunung dan masuk hutan sekitar Eelahaji, sementara pasukan TNI masih tetap bertahan di pos-pos pertahanannya. Dalam operasi tersebut menghabiskan waktu tujuh hari tujuh malam.

Karena posisi markas yang mulai terdesak, pada tanggal 29 Juli 1961 Andi Bahtiar selaku komandan Bataliyon 21 kemudian disusul Haerun Sahadat sebagai komandan Bataliyon 24 bersama anak buahnya menyerahkan surat perjanjian kepada pihak militer untuk menjaga keamanan mereka dari orang-orang yang kontra terhadap DI/TII dan memerintahkan kepada semua anak buahnya dimana saja berada untuk segera mengikuti jejaknya mentaati dan melaksanakan himbauan pemerintah agar kembali melapor kepos-pos terdekat. Kemudian Andi Bahtiar dan Haerun Sahadat di bawah ke Raha-Muna untuk diamankan dan mendapat pembinaan.

Dengan menyerahnya beberapa petinggi DI/TII kepada pemerintah Republik Indonesia maka pemerintah Kulisusu, menghimbau agar anggota gerilyawan DI/TII segera melapor kembali kepos-pos TNI terdekat, hampir semua pasukan DI/TII yang berada di Kulisusu melapor dan menyerahkan diri kepada aparat pengamanan yang berada di daerah tersebut bahwa mereka telah keluar dari DI/TII dan akan tunduk kepada peraturan pemerintah setempat. Setelah mereka kembali ke pangkuan ibu pertiwi pemerintah mengadakan bimbingan mental dan pemahaman tentang pentingnya perdamaian antar umat beragama untuk bersama-sama hidup bermasyarakat dan memelihara kedamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Setelah kawasan Kulisusu dinyatakan aman dari gerakan DI/TII maka pemerintah menghimbau kepada masyarakat yang mengungsi dan diungsikan selama proses penumpasan untuk kembali lagi ke kampungnya masing-masing. Sebagai akhir pembahasan, terlepas dari yang dikemukakan di atas, bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah hingga DI/TII dapat kembali ke masyarakat Kulisusu dan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia hanyalah pendekatan kekeluargaan. Disatu sisi bahwa pemberontakan DI/TII dalam konteks waktu saat itu memungkinkan untuk menuntut kepada pemerintah pusat sehubungan berkembangnya kebijaksanaan pembangunan yang tidak adil dan terjadi praktek manipulasi. Juga satu hal yang perlu diingat bahwa terdapat komitmen antara DI/TII Abdul Qahar Mudzakar bersama seluruh pengikutnya tentang upaya bersama memerangi komunis di Indonesia. Singkatnya terdapat hal-hal yang mungkin dianggap punya nilai positif dalam perjalanan sejarah banyak yang tidak diungkap. Tetapi itulah karya ilmiah yang serba terbatas pada ruang permasalahan dan keterkaitan dengan tempat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahun 1957 DI/TII masuk di Kulisusu dan bermarkas di Ealahaji Ereke untuk Bataliyon 24 dengan pimpinan kapten TII Haerun Sahadat bersama pasukannya kurang lebih 70 personil. Munculnya DI/TII berdampak terhadap kehidupan masyarakat Kulisusu. Awal kedatangannya masih bersikap baik, tetapi kemudian lama-kelamaan mulai menimbulkan keresahan rakyat, karena mereka melakukan pembakaran, pengrusakan, dan sabotase. Kehidupan masyarakat menjadi porak-poranda, terutama di bidang ekonomi (perdagangan dan pertanian) bahkan yang lebih menyedihkan mereka membunuh rakyat yang menentang atau orang-orang yang merintangi perjuangannya.

2. Dampak yang lebih awal dirasakan oleh masyarakat akibat masuknya DI/TII di Kulisusu adalah mengungsinya penduduk secara besar-besaran dari tempat-tempat yang tidak aman yang menjadi basis gerilyawan menuju ke daerah-daerah yang lebih aman. Selain itu pula terjadinya pengerusakan, pembakaran, perampokan serta pembunuhan di tiap-tiap kampung.
3. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam menumpas DI/TII dari kawasan Kulisusu pemerintah mendirikan beberapa pos-pos pertahanan di daerah-daerah yang dianggap kurang aman dan membentuk Lembaga Kesatuan Pertahanan Sipil (LKPS).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya kita jadikan sebagai modal bangsa yang diwujudkan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Oleh keterbukaan semua pihak agar tetap menjaga dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama-sama.
2. Merupakan suatu kendala bagi para peneliti bila telah berada di lapangan adalah sikap masyarakat setempat yang seakan-akan sumber atau cerita-cerita sejarah masa lalu yang dianggap tabu dan selalu dirahasiakan. Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah setempat, khususnya pemerintah Kulisusu agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat, supaya masyarakat mempunyai sifat keterbukaan dalam mengungkapkan sumber sejarah yang mereka telah ketahui.
3. Dengan adanya penelitian ini kiranya dapat membantu dan dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti lainnya dalam rangka pengkajian sejarah lokal Sulawesi Tenggara, khususnya sejarah lokal Kulisusu yang ada relevansinya dengan penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alsa, Asmadi. 2010. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dedy. 2014. *Gerakan DI/TII di Kecamatan Siotapina Tahun 1957-1960*. Skripsi. Baubau: Universitas Dayanu Ikhsanuddin.
- Dijk, C. Van. 1995. *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta. Grafitti.
- Diwan. 2000. *Peranan Arief Laode Anda dalam Penumpasan Pemberontakan DI/TII di Kulisusu (1956-1965)*. Skripsi. Kendari: Haluoleo.
- Dudung, Abdurahman. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz: Media.
- Hadara, Ali. 1998. *DI/TII di Kawasan Perairan Tiworo dan Sekitarnya dari Bataliyon X07 KGSS Hingga Resimen II Hasanuddin*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hamid, Abd. Rahman. 2008. *Abdul Qahar Mudzakar di Persimpangan Jalan*. Makassar: Pusat.

- Mulyadi. 2011. *Gerakan DI/TII di Jeneponto Tahun (1953-1965)*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Notosusanto, Nugroho, 1976. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Idaya.
- Poesponegoro, Marwati Djoened. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs. M. C. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Storey, Willdam Kelleher. 2011. *Menulis Sejarah Panduan untuk Mahasiswa Edisi Kedua*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryanegara, Ahmad Mansyur. 2010. *API Sejarah 2*. PT. Salamadani Pustaka Semesta.
- Suwartono. 2014. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.